

Jurnal
EKONOMI PEMBANGUNAN
Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan

Volume 8, No.1, Juni 2007

Pimpinan Redaksi

Didit Purnomo

Dewan Redaksi

Bambang Setiaji	Universitas Muhammadiyah Surakarta
M. Wahyuddin	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Yuni Prihadi Utomo	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Daryono Soebagiyo	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Maulidyah Indira Hasmarini	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Edy Rahmantlyo Tarsilohadi	Universitas Bengkulu
Sutomo	Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Waridin	Universitas Diponegoro, Semarang

Pelaksana Tata Usaha

Siti Qomariah
Woro

Periode Terbit

2 kali dalam setahun

Terbit Pertama

Juni 2000

Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan hasil penelitian dan kajian teoritis mengenai masalah-masalah ekonomi dan pembangunan, khususnya di Indonesia. Diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan atau dalam proses terbit oleh media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 15-25 halaman, dengan format seperti tercantum pada prasyarat naskah jurnal **EKONOMI PEMBANGUNAN** di halaman belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format dan tata cara lainnya.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Subag Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102; Telpon (0271) 717417 psw 229, *E-mail:* jepums@yahoo.co.id *Website:* <http://www.ums.ac.id>

Harga jurnal per eksemplar: Rp 25.000,- (+ ongkos kirim)

Untuk pembelian atau berlangganan:

- Hubungi redaksi melalui e-mail jepums@yahoo.co.id dan didiet_p@yahoo.com atau
- Kirimkan formulir yang terlampir dalam JEP FE UMS dengan disertai tanda bukti Bank telah kirim uang ke rekening JEP FE UMS

OPTIMALISASI ZIS DAN PENGHAPUSAN PAJAK: SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI ERA OTONOMI DAERAH

Sofyan Eko Putra

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang

E-mail: sofyan_riset@yahoo.co.id

ABSTRACT

Poorness represent the important problems faced by the Indonesian nation, various effort have been conducted by government, but pursued with the fundamental constraint development failure, till factors of moral hazard make the poverty problems always become the new problems.

Zakah, infaq, and shadaqah (ZIS) representing the part of fiscal instrument of Islam, needed in overcome poverty, that is passing gift program special economic incentive (zakat), and extra incentive from infaq and shadaqah as capital of the poor deceiveness through the development in pattern of partner and financing.

On the other side, tax as conventional fiscal instrument, up to now still becomes the backbone of APBN in order to prosperity distribution.

The aim of this paper is provide the fiscal analysis through the optimize of ZIS and tax abolition in context to rising the economic independence of poor society.

Resolving through the optimize of ZIS and tax abolition expected applicable utilize the rising of economic independence of poor society in autonomy era.

Keywords: *zakah, poorness, autonomy era, tax, empowerment, welfare*

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan pada dasarnya merupakan fenomena klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian utama negara-negara di dunia. *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000 mengharapakan seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015 (Putra, 2006).

Dalam konteks menyikapi perkembangan kemiskinan di Indonesia, pakar kemiskinan Gunawan Sumodiningrat menyatakan, pemerintah Indonesia bisa dikatakan hampir berhasil mengatasi kemiskinan. Disebutkan bahwa selama tahun 1976-1996 jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau 40 persen dari jumlah penduduk (1976) turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3 persen (1996). Krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 23,4 persen pada tahun 1999, yang merupakan akibat dari

banyaknya perusahaan atau sentra ekonomi menghentikan kegiatan ekonomi sehingga bertambahnya angka pengangguran. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37 juta jiwa atau sekitar 19 persen, dan mulai turun pada tahun 2002 menjadi 18,2 persen, dan kembali turun menjadi 17,4 persen di tahun 2003. Namun di akhir tahun 2004 terdapat kecenderungan jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 54 juta jiwa. (Business News, 7 September 2005:3).

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shadaqah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela. Keduanya berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan.

Sedangkan, dalam fiskal konvensional, pajak hingga kini menjadi masih menjadi tulang punggung APBN dalam menghadapi pengeluaran negara.

Keduanya, pajak dan zakat merupakan dua ujung tombak pemerataan pendapatan yang selama ini berjalan di Indonesia. (Pikiran Rakyat, 27 Desember 2005) Berdasar hasil penelitian Pusat Budaya dan Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004-2005, yang menyebutkan potensi zakat, infak, dan shadaqah setiap tahunnya mencapai Rp 19,3 triliun. Sedangkan berdasar data BAZ nasional dan daerah serta lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan pemerintah pusat maupun daerah jumlahnya kurang dari Rp 300 miliar per tahun. Dan, pajak masih diusahakan terkait dengan *tax ratio*-nya.

Namun telah dijelaskan terhadap hukum diselenggarakannya pajak, yaitu:

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan cara yang batil...(Qs. An-Nisa: 29)

Dari Abul Khair r.a. beliau berkata: “Maslamah bin makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwaifi’ bin Tsabit r.a., maka ia berkata: “Sesungguhnya para penarik/ pemungut pajak (diadzab) di neraka. (HR.Ahmad 4/143, Abu Dawud: 2930) (al-Furqon, 39:2006)

Berdasarkan hal tersebut penghapusan pajak dan optimalisasi zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah.

KESIMPULAN

1. Hukum pajak adalah haram. Penghapusan pajak, dapat mendorong terciptanya sumber penerimaan baru, dengan optimalisasi sumberdaya asli yang belum terkelola secara efektif dan efisien.
2. Zakat, infak, shadaqah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infak, dan shadaqah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahaan.

3. Penghapusan pajak, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan stabilitas makro ekonomi yang lebih baik, sebagai akibat membaiknya iklim investasi.

Selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Revitalisasi kelembagaan yang menekankan kepada prinsip *good governance*, agar dalam praktiknya BAZNAS (pemerintah) sebagai koordinator kelembagaan zakat di Indonesia memiliki manajemen organisasi yang baik. Sehingga, diharapkan adanya korelasi yang positif antara *good governance* dengan peningkatan hasil penghimpunan dana zakat, infak, shadaqah, dan profesionalisme dalam penyaluran.
2. BAZNAS/LAZ disarankan memiliki data mustahiq yang definisi operasionalnya sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, sehingga dapat memutuskan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.
3. Pemerintah disarankan fokus pada pro-poor policy (kebijakan yang secara umum memihak orang miskin).
4. Masyarakat disarankan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pengentasan kemiskinan BAZ/LAZ.
5. Akademisi disarankan dapat mengkaji dan meneliti lebih komprehensif mengenai zakat, infak, shadaqah dalam penggunaannya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia.
6. Swasta (pengusaha), memberikan kesempatan kerjasama bisnis dengan masyarakat fakir dan miskin yang diberdayakan,

dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al Abbas Kholid bin Syamsudi, 2003, *Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat*, dalam Majalah As-Sunnah, Edisi 06/VII/1424 H: Solo
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, 2004, *Golongan yang Berhak Menerima Zakat*, dalam Majalah Al-Furqon, Edisi 09 Th III/Rabiulawal Tsani 1425 H: Gresik
- Al-Albani, Muhammad Nasirudin, 2002, *Islam Mengentaskan Kemiskinan: Tinjauan Kritis, Analisis tentang Hadits Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bandu, Baharudin, 2005, *Zakat Untuk Kegiatan UMKM*, makalah Seminar dan Pelatihan Zakat "Saatnya Zakat menjadi Bagian Hidup Kita", Peduli Dhuafa ROHIS FE UNDIP, 25 September 2005: Semarang
- Ghanim, Adil Rasyad, 2001, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta: Yayasan Al-Sofwa.
- Hafidhudin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Hafidhudin, Didin, 2005, *Zakat untuk Kesejahteraan Bersama*, makalah Seminar dan Pelatihan Zakat "Saatnya Zakat Menjadi Bagian Hidup Kita", Peduli Dhuafa ROHIS FE UNDIP, 25 September 2005 Semarang.
- Ibnu Katsir, 2003, *Tafsir Ibnu Katsir* (peneliti: Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh; penterjemah: M. Abdul Ghofar E.M), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kemiskinan: Mencari Terobosan Serangan*, dalam Business News, Edisi 7257/7 September 2005
- Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Milenium Indonesia*, 2004, dalam www.undp.or.id
- Presiden "Kelola Zakat Secara Profesional"*, dalam Pikiran Rakyat, 27 Oktober 2005.
- Muhamad Ali, Abu Ibrahim, 2006, *Pajak dalam Islam*, dalam Majalah al-Forqon Edisi 1 Tahun 6: Sya'ban 1427 (September 2006).
- Nababan, T. Sihol, 2004, *Bunga Rampai Ekonomika Pembangunan*, (editor: T. Sihol Nababan dan Agung Riyardi), Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang
- Putra, Sofyan Eko, 2006, *Zakat, Infak, Shadaqah: Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Semangat Berusaha Masyarakat Miskin di Indonesia*, (makalah), Universitas Diponegoro, Semarang
- Pemiskinan Berkelanjutan: Derai Air Mata 60 Tahun Merdeka*, dalam Business News, Edisi 7294/15 Agustus 2005
- Rifa'i, Bahtiar, 2004, *Upaya Pengembangan Agribisnis Berkerakyatan di Propinsi Jawa Tengah Demi Mencapai Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi* (Karya Ilmiah), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Seda, Frans, 2002. *Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis*, dalam Kumpulan Artikel "Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi" Jakarta: Penerbit Kompas.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005, *Panduan Zakat: Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Meng-gagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wibisono, Yusuf, 2005, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*, dalam Usahawan No.09 Th XXXIV, September 2005.